

RASIO KEBERADAAN LAHAN TERBANGUN DI KECAMATAN KARTASURA KETERKAITANNYA DENGAN PROSES PEMEKARAN KOTA SURAKARTA MENGGUNAKAN CITRA QUICKBIRD

Dahroni

Pendidikan Geografi
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan
Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Kartasura sebagai kota satelit menunjukkan pertumbuhan yang pesat akibat pemekaran morfologis Kota Surakarta (urban sprawl). Indikator yang paling mudah dilihat adalah pesatnya pertumbuhan perumahan di wilayah tersebut. Apabila tidak direncanakan penataan ruang dengan baik berdasarkan pertimbangan potensi dan produktifitas lahan maka produksi hasil pertanian sebagai sektor yang penting untuk mendukung PAD akan menurun. Oleh karena itu, selaras dengan penyusunan RTRW perencanaan pembangunan yang berbasis pada potensi wilayah sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh urban sprawl terhadap pertumbuhan area terbangun dilihat dari rasio area terbangun terhadap luas wilayahnya. Data yang digunakan adalah Citra Quickbird 2004. Ekstraksi informasi dari citra dilakukan dengan digitasi onscreen untuk menghasilkan informasi bangunan existing (building footprint) selanjutnya dilakukan analisis rasio luas lahan terbangun terhadap keseluruhan luas wilayah masing-masing kelurahan. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa rerata rasio area terbangun di Wilayah Kartasura adalah 19% dengan rasio tertinggi terdapat di Wilayah Desa Kartasura sebesar 32%. Salah satu penyebabnya adalah bahwa Desa Kartasura merupakan pusat pertumbuhan di mana banyak fasilitas sosial ekonomi terpusat di sana.

PENDAHULUAN

Manusia membutuhkan lahan untuk kelangsungan hidupnya, tempat hidup dan usaha. Sebagai negara agraris, lahan mempunyai fungsi yang amat penting bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Terutama bagi masyarakat petani, dalam usaha memenuhi kebutuhannya, lingkungan alam dalam hal ini tanah (lahan) sangat mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Lahan bukan saja sebagai sumber kehidupan atau sumber mata pencaharian bagi petani, namun juga sebagai tempat berlangsungnya kegiatan sehari-hari, bahkan bangunan untuk tempat tinggalpun tidak bisa terlepas dari tanah (lahan). Redfield (1982) menyebutkan bahwa bagi petani, usaha pertaniannya adalah suatu mata pencaharian dan suatu cara kehidupan, bukan suatu kegiatan usaha untuk mencapai keuntungan. Petani sebagai seorang yang mengendalikan secara efektif sebidang tanah yang dia sendiri sudah lama terikat oleh ikatan-ikatan tradisi dan perasaan. Tanah dan dirinya adalah bagian dari suatu hal, suatu kerangka hubungan yang telah berdiri lama. Dengan demikian tanah mempunyai arti dan nilai yang sangat strategis yang menyangkut berbagai hak dan kewajiban serta hal-hal yang sangat kompleks, misalnya dalam hal penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah.

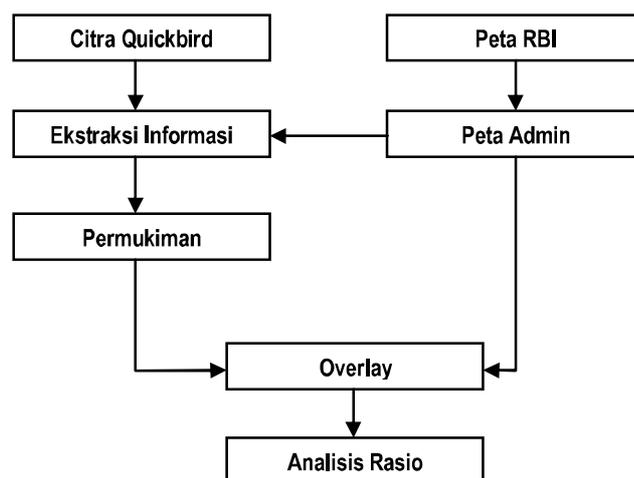
Lahan merupakan salah satu sumberdaya alam yang terbatas, lebih-lebih lahan pertanian yang produktif. Sumberdaya ini bersifat statis dan tidak dapat bertambah kuantitasnya dari masa ke masa. Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan jumlah penduduk makin bertambah. Karena itu, problem pokok yang dihadapi semua negara agraris saat ini adalah bagaimana memanfaatkan secara optimal sumberdaya lahan mengingat jumlah penduduk yang makin bertambah. Di samping itu juga perlu dilakukan upaya-upaya bagaimana cara memelihara, mengawetkan, memperuntukkan, mengusahakan, mengurus, dan membagi lahan beserta hasilnya dengan sedemikian rupa, sehingga diperoleh manfaat yang paling menguntungkan bagi kesejahteraan rakyat dan negara (Soetikno dalam Fauzi, 1999).

Hampir setiap putusan mengenai pemilikan dan penggunaan sumberdaya lahan dipengaruhi oleh kebijaksanaan pemerintah juga program-program pemerintah (Cahyono, 1982). Akan tetapi, sering ditemui adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang justru hanya berdampak positif pada kelompok tertentu saja dan merugikan masyarakat petani yang menjadi sasarannya. Sektor pertanian merupakan penghasil bahan pangan dan sekaligus merupakan tumpuan kehidupan bagi sebagian besar penduduk maka dapat disimpulkan bahwa sektor yang paling menentukan dalam pencapaian ketahanan pangan nasional ialah sektor pertanian. Akan tetapi peningkatan sektor pertanian dalam pencapaian ketahanan pangan sekarang ini terkendala dengan kenyataan bahwa ketersediaan lahan pertanian di Indonesia khususnya di Jawa semakin sempit terutama lahan sawah, sehingga upaya peningkatan produksi padi untuk memenuhi kebutuhan pangan akan semakin bermasalah. Hasil sensus pertanian menunjukkan bahwa penyebab penyempitan lahan sawah di Jawa antara lain adanya konversi lahan sawah menjadi lahan non pertanian terutama untuk pembangunan kawasan pemukiman. Oleh Kasryno (1997) disebutkan bahwa diperkirakan, lahan sawah di Jawa yang beralih fungsi untuk penggunaan non pertanian mencapai sekitar 30-100 ribu hektar per tahun. Konversi lahan terutama di Jawa sebagai gudang pangan nasional, menyebabkan gangguan yang serius dalam pengadaan pangan nasional. Di samping itu konversi lahan sawah yang tidak terkendali dapat menyebabkan penurunan kapasitas penyerapan tenaga kerja pertanian dan pedesaan serta penurunan atau hilangnya aset pertanian yang bernilai tinggi.

Kecamatan Kartasura sebagai kota satelit menunjukkan pertumbuhan yang pesat akibat pemekaran morfologis Kota Surakarta (urban sprawl). Indikator yang paling mudah dilihat adalah pesatnya pertumbuhan perumahan di wilayah tersebut. Apabila tidak direncanakan penataan ruang dengan baik berdasarkan pertimbangan potensi dan produktifitas lahan maka produksi hasil pertanian sebagai sektor yang penting untuk mendukung PAD akan menurun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio pertumbuhan area terbangun di Kecamatan Kartasura menggunakan Citra Quickbird dan Sistem Informasi Geografis.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dapat dijelaskan secara skematis sebagai berikut:

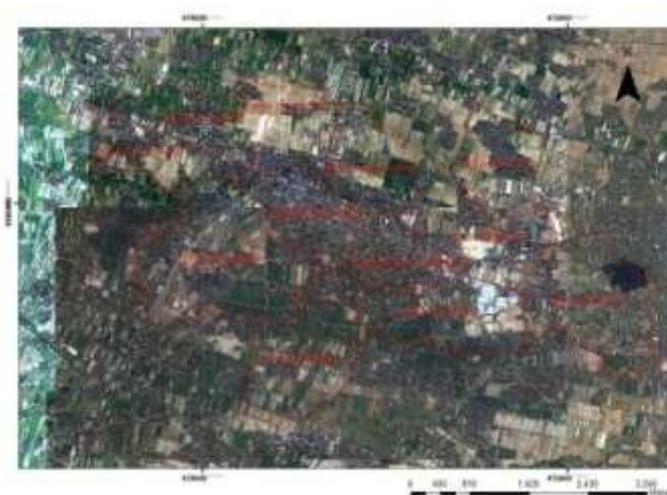


Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alih fungsi berarti berpindah fungsi (KBBI, 1996). Menurut Utomo, et al (1992) dalam Prasetyo (2004) alih fungsi lahan mengandung pengertian perubahan penggunaan oleh manusia. Lahan merupakan sumber daya alam strategis bagi pembangunan. Hampir semua sektor pembangunan fisik membutuhkan lahan, seperti sektor pertanian, kehutanan, perumahan, industri, pertambangan dan transportasi. Walaupun kriteria lahan yang diperlukan untuk setiap sektor berbeda, namun pada kenyataannya masih sering terjadi benturan kepentingan dan alih fungsi lahan.

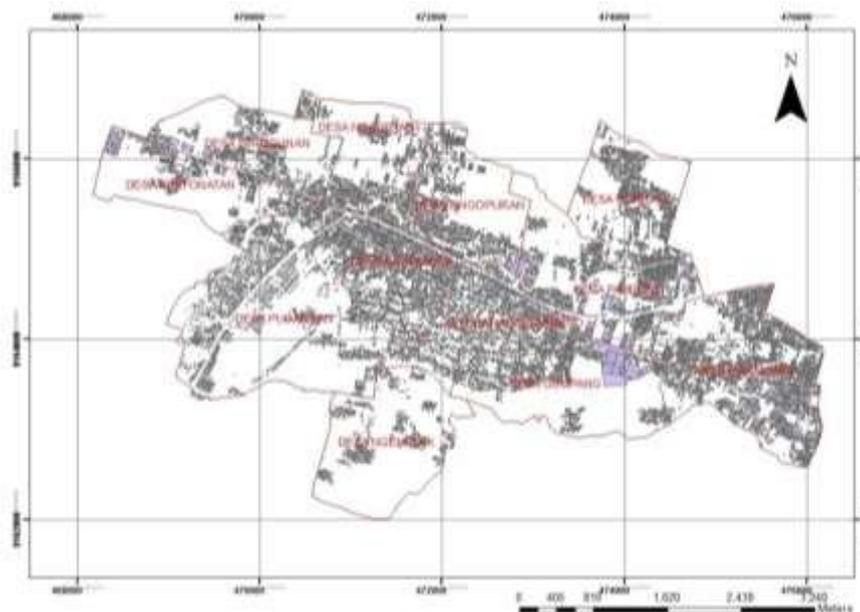
Intensitas pembangunan yang menuntut penyediaan tanah yang relatif luas untuk berbagai keperluan (permukiman, industri, berbagai prasarana) memaksa alih fungsi tanah pertanian, menjadi tanah non pertanian dengan segala konsekuensinya. Perkembangan yang terjadi tersebut boleh dikatakan hampir tidak menyentuh pola kehidupan petani yang semakin sulit untuk menghindarkan diri dari keterpaksaan melepaskan tanahnya karena praktek perijinan menunjukkan alih fungsi tanah berdasar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dati II yang karena alasan kepentingan pembangunan mengarahkan alih fungsi tanah tersebut (Sumardjono, 2001). Berdasarkan kebijakan tersebut, pada tahun 2004 Kecamatan Kartasura sudah menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari kenampakan Citra Quickbird (Gambar 2).



Gambar 2. Citra Quickbird Kecamatan Kartasura Tahun 2004

Mengingat kepada Undang-Undang No 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang serta Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1996 tentang pelaksanaan hak dan kewajiban, serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang, kemudian peraturan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukoharjo. Dalam peraturan tersebut, terutama pasal 24 yaitu mengenai rencana pengembangan kawasan prioritas Kabupaten Sukoharjo di setiap kecamatan. Disebutkan bahwa untuk Kecamatan Kartasura diprioritaskan sebagai kawasan pusat perdagangan grosir, pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata dan pengembangan kawasan agropolitan (Pemerintah Daerah Sukoharjo, 2004). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut kemudian lebih diperinci menjadi Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kecamatan Kartasura dimana dalam Bab II mengenai kebijaksanaan dasar pengembangan tata ruang terutama fungsi sekunder dari Kecamatan Kartasura, salah satunya yaitu perumahan. Lahan pekarangan yang ada sekarang luasnya 786,21 Ha dan pada akhir perencanaan direncanakan sebesar 854,69 Ha. Dengan demikian terdapat 68,48 Ha sawah yang dirubah menjadi lahan pekarangan. Dari lahan tersebut, sebanyak 80 % digunakan untuk perumahan, sisanya untuk jalan dan fasilitas pelayanan umum/ masyarakat (Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kartasura, 1989).

Hasil analisis terhadap Citra Quickbird (Gambar 3) menunjukkan bahwa pada tahun 2004 menunjukkan bahwa rerata rasio area terbangun di dari masing-masing desa di Wilayah Kecamatan Kartasura sebesar 19% (Tabel 1). Rasio area terbangun terbesar terdapat di wilayah Desa Kartasura mengingat Desa ini merupakan pusat pelayanan dimana terdapat banyak fasilitas sosial dan ekonomi. Sehingga kawasan ini menjadi pusat pertumbuhan di Kecamatan Kartasura.



Gambar 3. Hasil Interpretasi Bangunan di Wilayah Kecamatan Kartasura

Tabel 1. Hasil Analisis Rasio Area Terbangun Wilayah Kecamatan Kartasura

Nama Desa	Luas Area (M2)			Rasio (%)
	Tidak Terbangun	Terbangun	Total	
Desa Gonilan	1175752.154	224697.468	1400449.622	16%
Desa Gumpang	1578631.908	347399.878	1926031.786	18%
Desa Kartasura	901442.664	427607.612	1329050.276	32%
Desa Kertonatan	1240981.651	231443.7	1472425.351	16%
Desa Makahaji	1772812.651	640265.093	2413077.744	27%
Desa Ngadayan	1059212.555	208758.194	1267970.749	16%
Desa Ngemplak	1772756.492	107119.352	1879875.844	6%
Desa Pabelan	1414625.945	393970.439	1808596.384	22%
Desa Pucangan	3056106.835	392111.484	3448218.319	11%
Desa Singopuran	1155319.647	221123.976	1376443.623	16%
Desa Wirogunan	1108638.801	257003.175	1365641.976	19%
Kelurahan Ngadirejo	1149326.899	354581.956	1503908.855	24%
Total	17385608.2	3806082.327	21191690.53	

KESIMPULAN DAN SARAN

Kecamatan Kartasura mengalami pertumbuhan area terbangun dengan pola mengikuti jaringan jalan (dilihat dari hasil analisis citra). Rasio area terbangun terbesar terdapat di wilayah Desa Kartasura mengingat Desa ini merupakan pusat pelayanan dimana terdapat banyak fasilitas sosial dan ekonomi. Sehingga kawasan ini menjadi pusat pertumbuhan di Kecamatan Kartasura. Penataan kawasan ini perlu dilakukan dengan mempertimbangkan RTRW/RUTK yang telah ditetapkan mengingat pertumbuhannya yang semakin pesat.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2002. *Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Sukoharjo*. BPS. Sukoharjo.
- Cahyono, Bambang T. 1982. *Ekonomi Pertanahan*. Liberty. Yogyakarta.
- Ilham, Syaikat, Friyatno. 2000. *Perkembangan dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konversi Lahan Sawah Serta Dampak Ekonominya*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian Bogor. Jawa Barat
- Jaya, INB. 1989. *Tinjauan Yuridis Tentang Redistribusi Tanah Pertanian dalam Rangka Pelaksanaan Landreform*. Liberty. Yogyakarta.
- Jayadinata, JT. 1986. *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*. ITB. Bandung.
- Kartono, K dan Gulo, D. 1987. *Kamus Psikologi*. Cv. Pionir Jaya. Bandung.
- Kasryno, Faisal. 1997. *Komitmen Kebangsaan untuk Menjadikan Masyarakat Tani yang Maju, Mandiri dan Sejahtera dalam Kebijakan Pembangunan Pertanian : Analisis Kebijakan Antisipatif dan Responsif No 17*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian. Bogor.
- Kusnadi, MH dan RD, Santoso. 1996. *Kamus Istilah Pertanian*. Kanisius. Yogyakarta.
- Mardikanto, T dan Sutarni. 1982. *Pengantar Penyuluhan Pertanian Dalam Teori dan Praktek*. Hapsara. Surakarta.
- Moertopo, Ali. 1975. *Buruh dan Tani Dalam Pembangunan*. Yayasan Proklamasi. Jakarta.
- Mustafa, B. 1988. *Hukum Agraria Dalam Perspektif*. Remadja Karya Cv. Bandung.
- Noor, M. 1996. *Padi Lahan Marjinal*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Parlindungan, AD. 1978. *Berbagai Aspek Pelaksanaan UUPA*. Alumni. Bandung.

- Pemerintah Daerah. 2004. *Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 2 Th 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo*. Pemerintah Daerah, Sukoharjo.
- Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo. 1989. *Rencana Umum Tata Ruang Kota Kartasura 1989-2009*. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.
- Prasetyo, S. 2004. *Analisis pengaruh Luas Lahan Pertanian Terhadap produksi Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Boyolali Jawa Tengah*. FP UNS. Surakarta.
- Purnomoaji, I. 2002. *Pengaruh Pembangunan Fisik Daerah Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Purworejo*. FP UNS. Surakarta.
- Purwasito, A. 2001. *Perspektif Kebijakan Publik dalam Otonomi Daerah*. Lab Komunikasi, Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNS. Surakarta.
- Redfield, R. 1982. *Masyarakat Petani dan Kebudayaan*. Rajawali. Jakarta.
- Rusastra dan G.S. Budhi. 1997. Konversi Lahan Pertanian dan Strategi Antisipatif dalam Penanggulangannya. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian*. Volume XVI, Nomor 4 : 107 -113. Badan Penelitian Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor
- Salindeho, J. 1993. *Masalah Tanah dan Pembangunan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Simatupang, P. 2003. *Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1 No 1*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi. Bogor.
- Singarimbun dan Effendi. 1995. *Metode Penelitian survei*. LP3ES. Jakarta.
- Soekanto, S. 1985. *Kamus Sosiologi*. CV Rajawali. Jakarta.
- Soekartawi. 1996. *Pembangunan Pertanian untuk Mengentas Kemiskinan*. UI Press. Jakarta.
- Sumaryanto, Hermanto, dan Pasandaran. 1996. Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Terhadap Pelestarian Swasembada Beras dan Sosial Ekonomi Petani. Dalam *Prosiding Lokakarya "Persaingan Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Lahan dan Air"*: Dampaknya terhadap Keberlanjutan Swasembada Beras: 92-112. Hasil Kerja Sama Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian dengan Ford Foundation. Bogor.
- Syafa'at, N., H.P. Saliem dan Saktyanu, K.D. 1995. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konversi Sawah di Tingkat Petani. *Prosiding Pengembangan Hasil Penelitian " Profil Kelembagaan Pemanfaatan Sumberdaya Pertanian, dan Prospek Pengembangan Argobisnis di Indonesia*. Buku 1: 42 – 56. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. Bogor.
- Witjaksono. 1996. Alih Fungsi Lahan: Suatu Tinjauan Sosiologi. Dalam *Prosiding Lokakarya "Persaingan Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Lahan dan Air"*: Dampaknya terhadap keberlanjutan Swasembada Beras: 113 – 120. Hasil Kerja Sama Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian dengan Ford Foundation. Bogor.